

Legislatif Perempuan di Dataran Tinggi Gayo: Peluang dan Tantangan

Sutrisno

STAIN Gajah Putih Aceh Tengah
sutrisno_stabat@yahoo.co.id

Ali Mustafa

STAIN Gajah Putih Aceh Tengah
ammustafa8@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to explore opportunities and challenges of women becoming legislative members in the 2014-2019 election in the Gayo highlands covering Central Aceh, Bener Meriah, and Gayo Lues. Our research find is the political dynasty became main factor cause opportunities of women's election as members of the legislature in the three regions. Even political figures, party cadres and NGO activists who are generally another major factor supporting women's electoral opportunities in electoral politics are not a factor supporting women's election to legislative members in the Gayo highlands. This phenomenon indicates that the quality and quantity of women representation in DPRK Aceh Tengah, Bener Meriah, and Gayo Lues were decreased, besides the strengthening of the paradigm of a society that still highly uphold the culture of patriarchy within the Islamic Shari'ah region of Aceh. Qualitative research methods are used in assessing the opportunities and challenges of women's political election to obtain in-depth data through in-depth observation and interviews as well as library studies in support of the general picture through related references. The phenomenon of women's election in the legislature concludes that the strengthening of patriarchal culture through the edict law that regulates the taboo (sumang) merges with the understanding of women and Islamic sharia which is the main challenge that causes women's election to become legislative members.

Keywords: *Legislative, Women, Opportunities, Challenges*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk menggali peluang dan tantangan perempuan menjadi anggota legislatif pada pemilu 2014-2019 di dataran tinggi Gayo (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues). Temuan yang didapat bahwa dinasti politik menjadi faktor utama yang mempengaruhi peluang keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif pada ketiga daerah tersebut. Jika melihat hasil pemilu 2009 menunjukkan jumlah perempuan legislatif nasional memang meningkat menjadi 18% atau sebanyak 103 perempuan dari pemilu tahun 2004 sebanyak 11,8% dari keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, hasil pemilu pada tahun 2014

yang lalu menunjukkan penurunan jumlah keterwakilan perempuan di DPR menjadi 17,32% atau sebanyak 97 perempuan.¹

Hal yang sama juga terjadi di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh khususnya di daerah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Adapun keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah pada tahun 2009 berjumlah 2 orang (7%) dan pada pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan menurun menjadi 1 orang (3%) dari 30 anggota DPRK Aceh Tengah. Begitu pula dengan komposisi anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2009 keterwakilan perempuan berjumlah 1 orang (4%) dan pada pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan tetap berjumlah 1 orang (4%) dari 25 anggota DPRK Bener Meriah. Selanjutnya pada tahun 2009 keterwakilan perempuan di DPRK Gayo Lues berjumlah 2 orang (10%) dan pada pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan tetap berjumlah 2 orang (10%) dari jumlah 20 anggota DPRK Gayo Lues.²

Fenomena penurunan dan minim keterwakilan politik perempuan berkaitan dengan pembagian domestifikasi (pembagian ruang) antara laki-laki dan perempuan. Tidak mengherankan jika paradigma politik dianggap sebagai arena publik yang tidak cocok bagi perempuan. Politik dianggap dunia yang penuh intrik, dimana terlalu bertentangan dengan karakter perempuan yang dicitrakan pengasih, sabar dan kurang tegas. Anggapan umum bahwa politik lebih tepat bagi laki-laki dibandingkan perempuan karena politik lebih identik dengan maskulinitas. Misalnya pola royal terhadap uang pada tahapan kampanye diidentikkan dengan tipikal laki-laki, karena pada umumnya perempuan cenderung lebih hemat dan cermat dalam mengelola uang. Akibat anggapan seperti itu, dunia politik mengasingkan perempuan³.

Budaya patriarki yang mengakar dan sistem politik yang didominasi oleh laki-laki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. Hubungan patriarki tidak hanya terjadi dalam lingkup kekerabatan saja, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, keagamaan, dan seksualitas. Maka perempuan selalu berada di bawah kuasa kaum laki-laki dalam pembuatan keputusan politik dan kebijakan publik.

¹ Irwansyah, Margaret Anna, (2013), *Paradoks Representasi Perempuan*. Jakarta: PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta, hal. 10.

² Diperoleh dari data arsip pemilu tahun 2014 pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues.

³ Ani Soetjipto, dkk, (2010), *Menyapu Dapur Kotor, Repleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi*. Jakarta: Puskapol UI, hal. 3-4.

Budaya patriarkhi meletakkan kontrol oleh laki-laki dalam setiap dimensi kekuasaan. Sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau kurang memiliki hak pada wilayah publik dalam masyarakat. Mereka memiliki ketergantungan kepada laki-laki baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, terutama dalam institusi pernikahan. Maka baik dalam keluarga maupun masyarakat meletakkan perempuan pada posisi subordinat atau inferior. Budaya tersebut juga memosisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Berbeda halnya dengan laki-laki, dimana memosisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut membuat mereka terbatas dalam kegiatan di publik dan politik, dimana arena politik identik dengan dunia laki-laki. Terdapat anggapan kurang lazim atau pantas apabila perempuan masuk ke arena politik yang dianggap dunia yang keras, sarat dengan persaingan bahkan terkesan sangat ambisius.⁴

Dalam tulisannya yang berjudul *Dimensi Politik Perempuan Aceh*, Aryos Nivada⁵ menyatakan bahwa berbicara perempuan Aceh terjun di ranah politik praktis (*public*), masih kuatnya paradigma dari kaum politikus laki-laki yang beranggapan bahwa perempuan lebih cocok berada di rumah, dapur, dan kasur (*domestic*), serta masih kuatnya budaya *patriarki* membuat sulitnya penerimaan perempuan di politik praktis oleh sebagian kaum lelaki. Tidak mengherankan ketika perempuan masuk ke organisasi politik, justru realitas yang terjadi adalah kemungkinan marginalisasi terhadap perempuan di partai politik. Terbukti dari perempuan Aceh hanya sebagai ‘pelengkap’ saja di partai politik, bukan bertujuan memberikan kesempatan berkeaktifan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di ranah publik.

Melihat realitas diatas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan dapat memperoleh kursi di legislatif. *Pertama*, dinasti politik, yaitu calon legislatif (*caleg*) yang basis rekrutmennya melihat aspek ikatan kekeluargaan dengan tokoh politik di kabupaten tersebut. Minimal *caleg* memiliki hubungan kekeluargaan dengan figur tertentu di daerah pemilihan. *Kedua*, figur populer yaitu *caleg* yang basis rekrutmennya melihat aspek popularitas calon. Beberapa hal yang mendukung aspek popularitas seperti halnya finansial, jaringan massa pengikut, tokoh masyarakat, pengusaha dan sebagainya. *Ketiga*, kader partai yaitu *caleg* yang basis rekrutmennya berdasarkan intensitas keterlibatan dalam aktivitas partai politik. *Keempat*, aktivis LSM yaitu *caleg*

⁴ Romany Sihite, (2007), *Perempuan, Kesetaraan, keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 158.

⁵ Aryos Nivada, (2013). *Dimensi Politik Perempuan Aceh*. Jakarta: rumahpemilu.org, hal. 8-9.

yang basis rekrutmennya didasarkan pada aktivis LSM yang pernah dilakukan. Berdasarkan keempat faktor tersebut, maka menjelaskan peluang keterpilihan perempuan mendapatkan perolehan suara dan kursi pada legislatif periode 2014-2019 di Dataran Tinggi Gayo (Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues).

B. METODE PENELITIAN

Saya melakukan penelitian ini di tiga daerah yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang peluang dan tantangan keterpilihan perempuan di legislatif pada wilayah dataran tinggi gayo. Penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah Pemilu legislatif 2014. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci seperti calon legislatif perempuan, anggota partai politik dan masyarakat umum lainnya. Selain itu studi kepustakaan melalui buku, jurnal, surat kabar juga dilakukan untuk menambah referensi terkait fenomena ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Keterwakilan Perempuan di Parlemen berkaitan dengan keseimbangan antara peningkatan secara kuantitas dan kualitas pemahaman mengenai idealitas keterwakilan perempuan. Faktanya hal itu masih jauh dari harapan, dimana kuantitas jumlah tidak mengalami kenaikan yang pesat dan kualitas pemahaman yang masih perlu ditingkatkan. Idealnya keterwakilan perempuan dapat menjadi lebih signifikan dalam memperjuangkan isu perempuan dan gender. Lovenduski menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai keterwakilan deskriptif dan substantif. Maksud keterwakilan deskriptif bahwa hanya perempuan yang mampu mewakili kepentingan perempuan, sehingga seharusnya apa yang diwakilkan atau diperjuangkan perempuan sebanding dengan jumlah perempuan yang ada di parlemen. Sementara substantif, tidak mempermasalahkan peningkatan kuantitas perempuan, tidak harus perempuan yang menjadi perwakilan perempuan. Keterwakilan substantif hanya fokus pada ide dan tujuan isu perempuan.⁶

Tujuan keberadaan perempuan dalam parlemen hendaknya dapat mempengaruhi proses politik yang berspektif gender di dalam parlemen. Menurut Subono⁷ keterwakilan politik

⁶ J. Lovenduski, (2008). *Research on Women's Political Representation*. PSA Women and Politic Conference, University of Surrey

⁷ Nur Iman Subono "Tokoh Politik Perempuan di Asia: Dinasti Politik atau Keterwakilan Politik Perempuan?", dalam *Jurnal Perempuan: Catatan Perjuangan Politik Perempuan*, No. 63, 2009, hal.79.

perempuan menjadi sesuatu yang sangat penting karena beberapa hal. *Pertama*, dapat dikatakan bahwa tidak ada demokrasi sejati (*no true democracy*) dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya (*no true people's participation*) dalam pemerintahan dan pembangunan, tanpa adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Maka untuk mewujudkan politik yang demokratis, maka keterwakilan perempuan sangat diperlukan.

Kedua, tujuan pembangunan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya partisipasi perempuan, bukan hanya dalam pembangunan tetapi juga dalam menentukan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Florence Butegwa, seorang pengacara dari Uganda, dalam Subono⁸ mengatakan bahwa “partisipasi politik perempuan bukanlah sebuah kemewahan tetapi suatu kebutuhan” (*women's participation in politics is not a luxury, but a necessity*). Keterwakilan politik perempuan adalah untuk menentukan perspektif dan tujuan pembangunan yang berpihak pada kepentingan perempuan. *Ketiga*, partisipasi perempuan akan membawa prioritas dan perspektif baru yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak. Signifikansi yang diharapkan dari keterwakilan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui parlemen. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyak regulasi dan anggaran responsif gender.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Squires (1999), penggolongan keterwakilan perempuan dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Keterwakilan Fungsional (*identity*)
2. Keterwakilan Sosial (*social*)
3. Keterwakilan Ideologi (*collective/party*)
4. Keterwakilan Geografis (*constituencies*)

Keterwakilan fungsional yaitu keterlibatan perempuan di legislatif, semata-mata karena mereka berhasil memenangkan pemilu. Perempuan memiliki identitas yang jelas untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Tetapi, kelompok massa pendukungnya tidak berasal dari satu golongan yang signifikan, melainkan berasal dari berbagai kalangan. Kemudian keterwakilan fungsional menurut Squires ini hampir sama dengan keterwakilan formal menurut Pitkin.

Selanjutnya keterwakilan sosial, dapat terjadi disebabkan karena perempuan memiliki jaringan sosial (dengan kelompok strategis perempuan) yang kuat sebelum mencalonkan diri, sehingga jaringan sosial tersebut menjadi kelompok pendukung. Tujuan dan kepentingan yang disuarakan perempuan di parlemen tergantung pada kepentingan mereka sendiri yang dianggap

⁸ *Ibid.*, hal. 80.

baik pula untuk para pendukungnya. Tipe lain ialah keterwakilan ideologi yang menunjukkan bahwa perempuan mencalonkan diri sebagai caleg, karena didukung oleh kelompok ideologis tertentu. Isu dan kepentingan yang disampaikan perempuan ketika kampanye merupakan isu yang sesuai dengan ideologinya. Begitu pula dengan kepentingan dan perjuangan perempuan ketika sudah berada di dalam parlemen. Ideologi antara perempuan caleg dengan kelompok pendukung, biasanya sejalan. Dan terakhir adalah keterwakilan geografis yaitu perempuan menjadi caleg dikarenakan didaulat untuk menjadi wakil dari daerah tertentu.

Berikut adalah profil anggota legislatif perempuan di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Daftar Nama Anggota Legislatif Perempuan

No	DPRK	Periode 2014-2019	Partai	Kuota	%
1	Aceh Tengah	1. Asma Yanti, Amd	Hanura	30	3,33%
2	Bener Meriah	1. Rahmah	Damai Aceh	25	4%
3	Gayo Lues	(1) Hj. Nurlaili, S.AP	PKPI	20	10%
		(2) Hj. Eliwati Siregar	Partai Aceh		

Sumber: Diolah dari data KIP Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues

Peluang Keterpilihan Perempuan dalam Politik Elektoral

Dari keempat anggota legislatif perempuan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun hampir semuanya terpilih karena dinasti atau politik kekeluargaan. Pertama adalah Asma Yanti yang berhasil memperoleh suara sebesar 1.056 melalui daerah pemilihan dua 2 meliputi Pegasing, Atu Lintang, Jagong Jeget dan Linge mengalahkan anggota legislatif petahana yaitu Ramiyanti dan Arlina dari Partai Golkar. Fakta tersebut memperlihatkan menurunnya perolehan kursi bagi perempuan di DPRK Aceh Tengah yang pada periode yang lalu berhasil memperoleh 2 kursi. Sebagai anggota legislatif perempuan dan memiliki usia termuda, ia memiliki karir politik yang masih baru, dimana bergabung dengan Partai Hanura pada 2013 dan diusung oleh Partai Hanura pada Pemilu 2014. Dinasti atau politik kekeluargaan bekerja sangat efektif untuk memenangkan pemilu, dimana ia didukung oleh latar belakang ayahnya sebagai pengusaha kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Jaringan ibunya untuk para guru juga cukup efektif mendulang suara baginya. Dapat dikatakan bahwa selain *track record* caleg, profil dan ketokohan keluarga mempengaruhi preferensi pemilih.

Kedua yaitu Rahmah, legislatif perempuan di DPRK Bener Meriah. Partai Damai Aceh mengusung Rahmah dan berhasil memperoleh sebanyak 1.771 suara. Perolehan suara tersebut membawa Rahmah dapat mengalahkan petahana yaitu Siti Anisah dari Partai Golkar dan Ernawati dari Partai PKPI. Menurut hasil wawancara dengan pengurus partai Damai Aceh, Rahmah bukan berasal dari pengurus partai Damai Aceh. Beliau merupakan masyarakat pada umumnya yang mendaftarkan diri ke partai Damai Aceh untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Namun isu politik bukan hal yang baru karena Rahmah pernah menjabat sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bener Meriah. Namun bila melihat perbandingan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan pada Pemilu legislatif 2014, maka perolehan suara Rahmah belum dikatakan signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi maupun peran aktif lembaga perempuan dalam mensosialisasikan kepentingan perempuan itu bahkan banyak kalangan perempuan tidak memilih perempuan. Diperkuat lagi oleh pemahaman yang masih rendah tentang keterlibatan perempuan dan hak-hak perempuan lainnya.

Ketiga yaitu Nurlaili merupakan anggota legislatif perempuan yang diusung oleh PKPI dan berhasil memperoleh 598 suara dan dibantu oleh suara partai dengan total 1005 suara. Ia maju dari Dapil 3 Gayo Lues meliputi Pining, Dabun Gelang, Rikin Gaib dan Pantan Cuaca. Ia merupakan tokoh perempuan di Kabupaten Gayo Lues. Beliau merupakan kader Partai PKPI dari Dapil III Gayo Lues dan turut berkontribusi dalam berjuang untuk melakukan pemekaran Kabupaten Gayo Lues dari Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu Nurlaili juga didukung oleh dinasti atau politik kekeluargaan, dimana abang iparnya yakni Ir. Muhammad Ali Kasim menjabat sebagai Penanggungjawab (Pj) Bupati pertama Gayo Lues. Dalam kampanyenya ia menekankan agar tetap konsisten dalam membela kebenaran dalam rangka membangun Gayo Lues ke depannya.

Keempat adalah Elly Wati Siregar yang merupakan anggota legislatif Gayo Lues yang diusung oleh Partai Aceh. Ia berhasil memperoleh sebesar 536 suara di dapil 1 meliputi Blangkejeren, Putri Betung dan Blang Pegayon. Suara tersebut dijumlahkan dengan suara partai sehingga mencapai 2.350 suara dan membawanya memperoleh kursi di DPRK Gayo Lues. Dengan latar belakang sebagai bidan, ia terlibat dalam politik sejak Pilkada tahun 2012 menjadi tim pemenang Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang diusung oleh Partai Aceh. Profesi sebagai bidan membuat jaringannya di masyarakat sangat melekat. Selain itu dirinya juga didukung oleh dinasti atau politik kekeluargaan karena suaminya pernah menjabat sebagai Camat di daerah tersebut.

Tantangan Keterpilihan Perempuan dalam Politik Elektoral

Peluang dan tantangan menjadi hal yang selalu berkaitan. Setelah melihat beberapa peluang dalam potret perempuan legislatif di atas, maka berikut beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh beberapa perempuan yang ingin terpilih menjadi legislatif. *Pertama*, Aceh secara historis memiliki sejarah konflik panjang dengan pemerintah pusat. Pada masa konflik perempuan menjadi salah satu kelompok yang menjadi korban sehingga mereka mengalami trauma atas kekerasan. Kekerasan yang mereka alami secara pribadi atau bersama-sama membuat perempuan Aceh merasa kehilangan harga diri, kurang percaya diri, takut, histeris, dan neurotik. Mereka menjadi kelompok yang kalah dan terpinggirkan. Kekalahan tersebut merupakan suatu stigma yang menjadi kendala bagi perempuan di Aceh dalam melakukan peran mereka di masyarakat secara normal⁹. Bahkan stigma tersebut turut berpengaruh dalam upaya perempuan untuk meningkatkan kemandirian maupun status mereka sebagai bagian dari masyarakat yang utuh.

Kedua adalah hukum syariat Islam, dimana terdapat hubungan antara eksistensi perempuan Aceh di dunia politik dengan nilai-nilai agama (Islam) yang mengakar kuat di masyarakat. *Ketiga* yaitu keberadaan parpol politik baik nasional maupun lokal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perubahan politik di daerah ini. Melalui parpol lokal dapat dilihat keberadaan agenda politik khusus untuk para kader perempuan, yang bisa dipantau melalui pola kaderisasi, pola rekrutmen, dan sebagainya. Selain itu, keberadaan parpol, baik parpol nasional maupun lokal idealnya dapat menjadi media strategis untuk mengusung dan menerapkan kebijakan *affirmative action*¹⁰.

Keempat adalah persoalan kesejahteraan yang akan menjadi alat bagi perempuan Aceh agar terlibat dalam dunia politik. Menurut keterangan salah satu narasumber:

Salah satu narasumber¹¹ mengatakan bahwa fenomena global Aceh pasca konflik adalah persoalan ekonomi dulu; belum masuk pada ranah politik. Untuk masuk ke dunia politik, perempuan Aceh era pasca konflik dianggap masih belum siap secara materi karena mereka sendiri masih berpikir di seputar masalah ekonomi.

Kelima adalah budaya patriarki, dimana melekat pada kepercayaan masyarakat dataran tinggi Gayo yaitu hukum edet yang mengatur an memberi batasan tentang apapun yang tabu

⁹ Rosnani Sahardin, "Sudahkah Status Perempuan itu Berubah?" dalam Jurnal Perempuan: *Perempuan di Wilayah Konflik*, No. 24, 2002, hal. 13.

¹⁰ Sarah Nuraini Siregar, "Pemberontakan Perempuan Aceh Dalam Dunia Politik: Studi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lokal", dalam *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima, t.t. hal. 47-50.

¹¹ Wawancara dengan Elly Wati Siregar, Anggota DPRK Gayo Lues, 08 Desember 2015.

(*sumang*) dan tidak boleh dikerjakan atau dikatakan dalam perilaku kehidupan masyarakat¹². Dalam kepercayaan ini, perempuan tidak dapat memimpin dan ini dinilai sebagai penyebab yang mempengaruhi minimnya jumlah kehadiran perempuan di legislatif. Budaya tersebut juga terbukti pada jabatan kepala desa, yang mana hanya satu orang yang menempati jabatan publik sebagai *geuchik*/Kepala Desa di kabupaten Aceh Tengah.

Dukungan dari masyarakat terhadap kemampuan perempuan perlu dibangun. Beberapa narasumber mengakui bahwa tantangan bagi perempuan yang terlibat dalam dunia politik di Aceh adalah masih kentalnya budaya patriarki. Budaya ini masih memandang perempuan tidak selayaknya terlibat dalam ranah politik. Ini memang tidak mudah bagi kaum perempuan Aceh, karena budaya tersebut turut dibalut dengan nilai agama/syariah Islam yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

Walaupun secara wacana tidak ada penolakan bagi masuknya perempuan dalam parpol serta lembaga politik formal, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol dan lembaga politik formal (legislatif dan eksekutif) masih tetap rendah. Parpol masih menempatkan perempuan dalam posisi-posisi yang “khas perempuan” seperti sekretaris ataupun bendahara dalam kepengurusan parpol. Perempuan jarang dilibatkan dalam rapat-rapat penting parpol seperti pada saat proses penyusunan DCS yang akan diusulkan parpol kepada KIP. Beberapa perempuan pengurus parpol menyatakan mereka tidak tahu menahu tentang proses penetapan DCS, termasuk caleg perempuan¹³. Akibatnya, caleg perempuan juga tidak memiliki akses dan kekuatan untuk menentukan proses penyusunan daftar caleg yang diajukan parpolnya.

Keenam, keberadaan perempuan dalam partai politik hanya sebatas memenuhi syarat dalam kebijakan *affirmative action*. Ironisnya pandangan ini banyak berasal dari parpol-parpol besar ketimbang parpol kecil. Seorang narasumber yang pernah menjadi caleg dari Parpol Rakyat Aceh untuk daerah pemilihan (dapil) di Aceh Tengah, mengemukakan bahwa

Posisi parpol kecil sulit bergerak, padahal jika dilihat dari visi dan misinya sangat idealis, terutama untuk kepentingan perempuan. Parpol Rakyat Aceh memiliki Departemen Bidang Perempuan dan secara faktual mendukung perjuangan untuk kesadaran dan perubahan bagi perempuan Aceh. Berbeda dengan partai politik besar yang tidak serius dan menganggap penting keberadaan perempuan di dalam parlemen.

¹² M. Yunus Melalatoa, (1997) *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: PT. Paktor, hal. 202.

¹³ Erni Agustini, “Perempuan dan Parpol Politik Lokal di Aceh”, dalam *Jurnal Afirmasi: Keterwakilan Politik Perempuan*, Vol. 01 Oktober 2011, hal. 53.

Ketidaksirosis parpol dalam menjaring caleg perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen terlihat dari temuan di daerah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang narasumber bahwa “terdapat salah satu parpol yang memiliki caleg perempuan berkualitas tetapi ditempatkan di dapil yang masyarakatnya tidak mengenal caleg tersebut”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa parpol hanya merekrut caleg perempuan demi mencukupi persyaratan administrasi tuntutan kebijakan *affirmative action*. Proses pelibatan perempuan dalam parpol tidak berdampak pada perjuangan kepentingan perempuan yang masih terabaikan, dikalahkan oleh kepentingan mayoritas laki-laki dalam partai politik. Fenomena inilah yang dilihat oleh beberapa narasumber menjadi kendala insitusional yang cukup menghambat bagi perempuan Aceh pada saat terjun ke dalam dunia politik¹⁴.

Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan dinasti dan politik kekeluargaan sebagai faktor utama keterpilihan perempuan sebagai legislatif 2014 pada dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Sementara caleg perempuan yang berasal dari kader partai dan aktivis LSM hampir tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues semakin menurun, ditambah dengan paradigma masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi budaya partiarki dalam wilayah syariat Islam Aceh.

D. PENUTUP

Permasalahan keterwakilan perempuan dalam hal politik merupakan hal yang sangat kompleks baik di lingkup nasional maupun lokal. Jika menekankan pada kuantitas meningkatkan representasi perempuan masih diperlukan karena jumlah menentukan suara perempuan dapat didengar di antara kaum mayoritas. Namun berbicara tentang keterwakilan perempuan di legislatif bukan hanya bicara mengenai peningkatan dan penurunan representasi secara jumlah, tetapi juga kemampuan secara kualitas dalam menentukan peran strategis yang dapat dilakukan oleh para anggota legislatif perempuan, baik advokasi kebijakan yang mendukung kepentingan perempuan. Kemudian sistem perekrutan parpol untuk menjaring para calon anggota legislatif perempuan tidak hanya disebabkan untuk menaati aturan hukum, namun harus serius dalam mendorong perempuan agar mampu bersaing dan menang.

¹⁴ Sarah Nuraini Siregar, “Pemberontakan...”, hal. 62-66.

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya keterpilihan perempuan di parlemen. *Pertama*, perempuan harus memahami secara mendalam mengenai fungsi dan wewenangnya sebagai anggota parlemen, agar dapat memanfaatkannya untuk memperjuangkan agenda perempuan. *Kedua*, perempuan harus memahami tujuan keterlibatannya di dalam parlemen, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan partai, tetapi karena berjenis kelamin perempuan sehingga diharapkan dapat menyuarakan kepentingan kaumnya. *Ketiga*, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas sebagai perempuan dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender dalam parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Erni. "Perempuan dan Parpol Politik Lokal di Aceh", dalam Jurnal Afirmasi: *Keterwakilan Politik Perempuan*, Vol. 01 Oktober 2011.
- Irwansyah, Margaret Anna. (2013). *Paradoks Representasi Perempuan*. Jakarta: PUSKAPOL FISIP UI Jakarta
- Karibi, R. A. I. N. (2015). Religion, Human Rights and the Challenges of Freedom. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 39-54.
- Lovenduski, J. (2008). *Research on Women's Political Representation*. PSA Women and Politic Conference, University of Surrey
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Melalatoa, M. Yunus. (1997). *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: PT. Pamatior
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Muttaqin, F. (2015). Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 19-38.
- Nivada, Aryos. (2013). *Dimensi Politik Perempuan Aceh*. Jakarta: rumahpemilu.org

- Sahardin, Rosnani. "Sudahkah Status Perempuan itu Berubah?", dalam *Jurnal Perempuan: Perempuan di Wilayah Konflik*, No. 24, 2002.
- Sihite, Romany. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siregar, Sarah Nuraini. "Pemberontakan Perempuan Aceh Dalam Dunia Politik: Studi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lokal", dalam *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima, t.t.
- Soetjipto, Ani dkk. (2010). *Menyapu Dapur Kotor, Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi*. Jakarta: Puskapol UI
- Subono, Nur Iman. "Tokoh Politik Perempuan di Asia: Dinasti Politik atau Keterwakilan Politik Perempuan?" dalam *Jurnal Perempuan: Catatan Perjuangan Politik Perempuan*, No. 63, 2009.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.